

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji motif di balik pemberian bantuan luar negeri oleh Tiongkok kepada Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19, khususnya melalui kerangka kerja sama Health Silk Road sebagai bagian dari inisiatif Belt and Road Initiative (BRI). Berdasarkan hasil analisis yang menggunakan pendekatan paradigma liberalisme serta teori motif bantuan luar negeri dari David Sogge, dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak hanya dilandasi oleh semangat kemanusiaan, tetapi juga bertumpu pada kalkulasi strategis yang berkaitan dengan kepentingan nasional Tiongkok.

Pertama, dari sisi motif sosial-politik, bantuan yang diberikan Tiongkok berperan sebagai instrumen diplomatik untuk memperkuat posisi negara tersebut sebagai kekuatan yang responsif dalam menghadapi krisis global. Pemberian bantuan ini juga memungkinkan Tiongkok untuk membangun akses yang lebih luas terhadap kebijakan domestik negara penerima, termasuk Indonesia, serta menyebarkan model tata kelola krisis kesehatan yang berbasis pada pendekatan otoriter dan teknologi tinggi.

Kedua, dari perspektif motif ekonomi, bantuan tersebut digunakan Tiongkok sebagai strategi untuk memperluas jaringan distribusi industri farmasi dan alat kesehatan miliknya. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan kebutuhan besar akan fasilitas kesehatan, menjadi pasar yang potensial untuk

perluasan ekspor produk Tiongkok. Selain itu, dukungan teknis berupa pembangunan pabrik vaksin juga menjadi bentuk penetrasi ekonomi yang sejalan dengan tujuan komersial dan investasi jangka panjang Tiongkok di kawasan Asia Tenggara.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan luar negeri dalam konteks pandemi tidak dapat dilepaskan dari motif-motif rasional negara donor. Bantuan yang tampak sebagai bentuk solidaritas internasional pada dasarnya merupakan refleksi dari kepentingan strategis yang mencakup dimensi politik, ekonomi, dan diplomasi global.

4.2 Saran

Merujuk pada temuan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan guna memperkuat tata kelola kerja sama internasional Indonesia, khususnya dalam konteks penerimaan bantuan luar negeri. Pemerintah Indonesia sebaiknya mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan penerimaan bantuan dari negara donor, termasuk Tiongkok, agar tidak menimbulkan ketergantungan jangka panjang baik secara ekonomi, teknologi, maupun kebijakan publik. Evaluasi secara menyeluruh terhadap implikasi strategis dari setiap bentuk bantuan perlu dilakukan, dengan tetap menempatkan kepentingan nasional sebagai pertimbangan utama. Dalam konteks kerja sama bilateral, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi krusial guna menjaga kedaulatan negara dan integritas kebijakan luar negeri.

Selain itu, bagi kalangan akademik dan peneliti, diperlukan pengembangan kajian lanjutan yang bersifat komparatif untuk mengkaji motif serupa dari berbagai negara donor lainnya dalam konteks krisis global. Penelitian mendalam mengenai keterkaitan antara bantuan luar negeri dan perluasan pengaruh geopolitik negara donor akan memperkaya pemahaman terhadap dinamika kekuasaan dalam sistem internasional kontemporer. Kajian semacam ini juga penting untuk melihat sejauh mana bantuan luar negeri bertransformasi dari instrumen solidaritas menjadi instrumen strategis yang diarahkan untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi.(Rolland, 2024)

Adapun bagi masyarakat umum serta pemangku kebijakan, penting untuk membangun kesadaran kritis bahwa setiap bentuk bantuan dari aktor internasional umumnya mengandung dimensi kepentingan tertentu yang tidak selalu bersifat altruistik. Oleh sebab itu, literasi publik mengenai dinamika hubungan internasional dan politik bantuan luar negeri perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mampu menilai secara objektif kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh negara. Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan dalam membaca kepentingan global yang terselubung dalam bentuk bantuan juga diperlukan agar Indonesia dapat menavigasi hubungan internasionalnya secara lebih berdaulat dan strategis.(Chow-Bing, 2020)